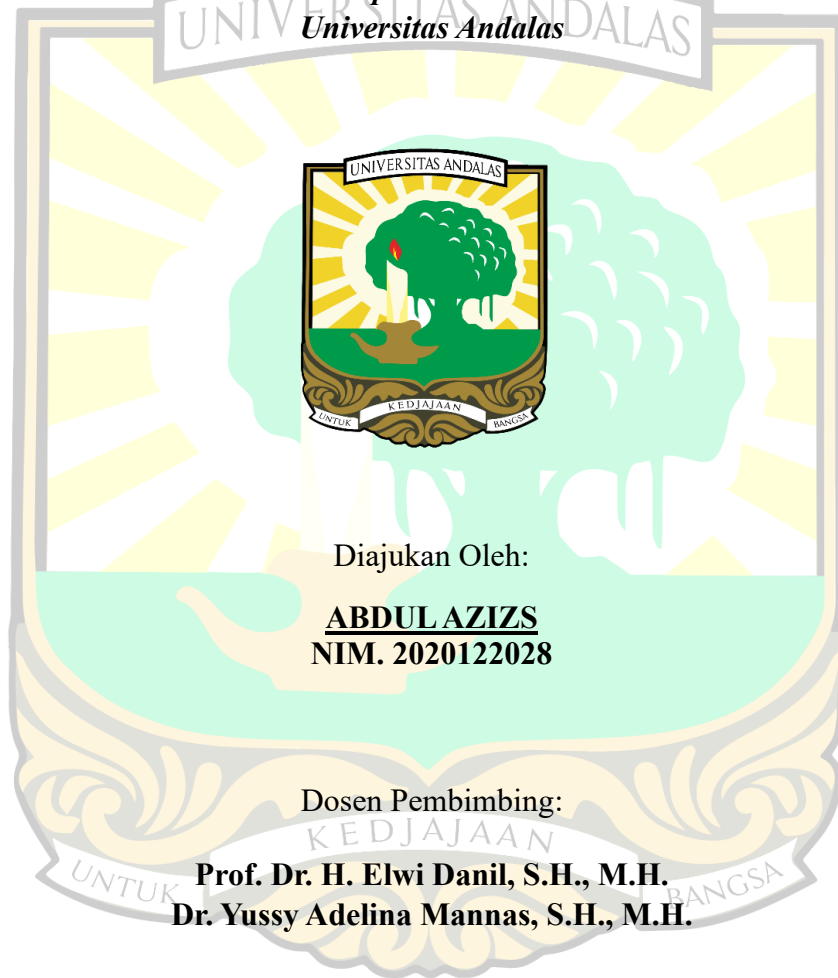


**PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
BERDASARKAN SURAT KETERANGAN WARIS PADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KOTA PADANG**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh gelar Magister

*Kenotariatan pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



Diajukan Oleh:

ABDUL AZIZS
NIM. 2020122028

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.
Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN WARIS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KOTA PADANG

(Abdul Aziz, 2020122028, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang)

ABSTRAK

Sebagai negara yang memiliki banyak golongan seperti adanya berbagai agama, suku bangsa, golongan, ras dan keyakinan, untuk mewujudkan rasa keadilan maka Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Pada prinsipnya ketiga sistem hukum tersebut dalam hal ini hukum waris yaitu samasama mengatur tentang peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Walau dalam praktek terjadi banyak perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (Burgelijk Wetboek) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Hukum waris adat bersifat plurarisme yaitu mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada, sebagaimana masyarakat adat Minangkabau memiliki prinsip garis kekerabatan Materilineal. Ranji merupakan hal yang sangat penting dalam sistem adat Minangkabau, ranji ini berfungsi sebagai bukti pada suatu kaum dalam struktur keturunan berdasarkan garis kekerabatan. Sedangkan Keterangan waris juga berfungsi untuk mengalihkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak, melakukan pengikatan jual beli dihadapan notaris dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu peralihan hak, dan juga merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menganalisa: 1) Bagaimanakah proses pembuatan surat keterangan waris dan ranji sebagai dasar timbulnya ahli waris pada masyarakat Kota Padang. 2) Bagaimanakah proses peralihan hak milik atas tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang berdasarkan surat keterangan waris dan ranji. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Menggunakan data sekunder sebagai bahan utama. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa: Lurah, Notaris dan Balai Harta Peninggalan berwenang membuat surat keterangan waris, sedangkan kedudukan Ranji dalam proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional mendapatkan posisi lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman utama dalam proses peralihan sertifikat hak milik bagi tanah yang sudah terdaftar.

Kata Kunci : Waris, Pewaris, Ahli Waris, Surat Keterangan Waris

**REGISTRATION OF TRANSFER OF LAND RIGHTS BASED ON
INHERITANCE CERTIFICATES IN TRADITIONAL LAW
COMMUNITIES IN PADANG CITY**

(Abdul Azis, 2020122028, Notarial Studi Program, Faculty of Law, Posgraduate Andalas
University)

ABSTRACT

As a country that has many groups such as various religions, ethnicities, classes, races and beliefs, to realize a sense of justice, Indonesia adheres to three legal systems, namely the customary law system, the Islamic legal system and the western legal system. In principle, the three legal systems, in this case inheritance law, regulate the transfer of rights to the heir's property to the heirs' heirs. Although in practice there are many differences because Islamic law and western inheritance law (Burgelik Wetboek) determine the conditions for death, while customary law is based on the hereditary system. Customary inheritance law is pluralist in nature, that is, it follows the provisions of customary law for existing tribes or ethnic groups, as the Minangkabau indigenous people have the principle of materiallineal kinship lines. Ranji is very important in the Minangkabau customary system, this ranji functions as proof of a group's descent structure based on kinship lines. Meanwhile, inheritance information also functions to transfer the inheritance of the heir to another party, for example selling, donating, relinquishing rights, carrying out sales and purchase agreements before a notary and other things in the form of a transfer of rights, and also changing the status of joint ownership of The assets inherited from the heir become the property of each heir. Based on this, the author is interested in conducting further research by analyzing: 1) What is the process of making inheritance certificates and ranji as the basis for the emergence of heirs. 2) What is the process of transferring ownership rights to land at the National Land Agency office based on the inheritance certificate and ranji. This research is descriptive in nature using an empirical approach method. Using secondary data as the main material. Based on the research, it was found that: the Village Head, Notary and the Heritage Center have the authority to make inheritance certificates, while Ranji's position in the process of transferring land rights due to inheritance at the National Land Agency Office is in a weak position and cannot be used as the main guide in the process of transferring property rights certificates. for land that is already registered.

Keywords : inheritance, testate, heir, Inheritance Certificate